**BAB II**

**KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

1. **Kerjasama bilateral**
2. **Pengertian kerjasama bilateral**

Latar belakang kerjasama bilateral melalui kerjasama yang dilakukan dengan adanya kesepakatan yang dicapai dan selanjutnya diwujudkan dalam berbagai kegiatan operasional yang melibatkan pihak pemerintah dan terutama dunia usaha dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama.[[1]](#footnote-1) Walaupun demikian, dalam kerjasama bilateral masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan (mutual benefit) diantara pihak-pihak yang bekerjasama. Dalam rangka itu, diperlukan suatu upaya penilaian dan evaluasi yang seksama terhadap kinerja yang dimiliki masingmasing pihak yang terlibat, serta secara optimal mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan daya saing dan daya guna kerjasama yang dilakukan bersama.

Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2 Negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak Negara dan unilateral.

1. **Tujuan adanya Kerjasama bilateral**

Setiap Negara pasti mempunyai tujuan untuk mencapai kerjasama yang dilakukan , inilah tujuan diadakannya kerjasama bilateral :

1. Mencukupi kebutuhan dalam negeri
2. Meningkatkan produktivitas dalam negri
3. Memperluas lapangan pekerjaan
4. Meningkatkan pendapatan Negara
5. Memperkuat rasa persahabatan antar Negara
6. Menyeimbangkan neraca pembayaran
7. Membantu pertumbuhan ekonomi suatu Negara
8. Melindungi industry dalam negeri
9. **Faktor – faktor penyebab timbulnya kerjasama antar Negara**

Adapun faktor – faktor yang mendorong agar suatu Negara mengadakan kerjasama dengan Negara lain yaitu :

1. Persamaan kekayaan sumber daya alam
2. Perbedaan faktor produksi
3. Perbedaan jumlah penduduk
4. Perbedaan kondisi geografis
5. Persamaan nasib dan letak geografis

Adapun dampak positif dan negatif suatu Negara mengadakan kerjasama bilateral yaitu :

* Dampak positif :
1. Peningkatan devisa Negara (pendapatan Negara)
2. Peningkatan produktivitas bagi suatu Negara
3. Peningkatan keuangan dan modal untuk melaksanakan pembangunan
* Dampak Negatif :
1. Masuknya tenaga asing
2. Ketergantungan terhadap bantuan Negara lain
3. Kadang terjadi kesalahan dalam pembuatan kebijakan

Jadi kerjasama bilateral adalah sebuah proses dalam pencapaian kepentingan bersama yang saling menguntungkan antar dua negara didalam sektor ekonomi baik dalam perdagangan, investasi, pertukaran tenaga kerja, dan lain-lain yang bertujuan untuk mencapai kemapanan ekonomi kedua negara dengan dasar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama sebelumnya.

1. **Hubungan luar negeri Indonesia dan Malaysia**
2. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia

Hubungan Indonesia-Malaysia saring dipahami dan dilihat secara emosional. Beberapa peristiwa seperti perlakuan terhadap para pekerja Indonesia di Malaysia, kemudian klaim Malaysia terhadap produk budaya dan karya Indonesia, selalu menimbulkan protes di Indonesia dan mengarah pada ketegangan hubungan di kedua negara. Lebih dari itu, berhasilnya Malaysia memenangkan kedaulatan terhadap pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan klaim Malaysia terhadap wilayah laut blok Ambalat di Laut Sulawesi telah memacu protes serius di Indonesia.

Dari berbagai protes itu, kesan umum yang berkernbang di Indonesia adalah bahwa Malaysia adalah negara yang semakin arogan, menginjak wibawa Indonesia dan tidak pantas balas budi. Di media bahkan disarankan bahwa untuk mendapatkan kembali respek Malaysia terhadap Indonesia, seharusnya Indonesia tidak segan-segan melakukan konfrontasi separti zaman Sukarno ataupun meningkatkan kemampuan tempur. Tidak sedikit yang menyarankan bahwa sudah saatnya Malaysia diberi pelajaran dari kesemena-menaan kebijakan mereka.

Hubungan Indonesia-Malaysia sebenarnya semakin kompleks dan tidak dapat dipahami secara emosional. Hal ini terlihat dari sikap kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia lebih banyak diinformasikan dan dipengaruhi oleh pemahaman lama yang statis tentang Malaysia sebagai bagian dari negara Serumpun yang memiliki banyak persamaan nasib dan nilai-nilai dengan Indonesia. Pemahaman demikian mengabaikan perubahan identitas yang telah terjadi di Malaysia termasuk juga cara mareka memahami dan melihat Indonesia. Walaupun konsep serumpun itu sendiri masih sering digunakan oleh para elit pemerintah Malaysia, tetapi makna dan fungsinya berbeda dengan yang dipahami secara umum di Indonesia.

Sumber konflik Malaysia-Indonesia berkaitan dengan perebutan sumber-sumber ekonomi seperti di Sipadan-Ligitan, Ambalat, masalah lintas batas, perdagangan galap, illegal logging, migrant workers dan human trafficking. Demikian juga dilaporkan sering terjadi pelanggaran perbatasan oleh Malaysia baik perbatasan udera, laut dan darat yang kemudian akan menimbulkan protes dari pihak Indonesia.

Namun sejauh ini penyelesaian berbagai masalah ini sering terhambat pada soal teknis pelaksanaan yang sulit dan kurangnya kemauan politik di kedua negara untuk sungguh-sungguh belum menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dilakukan dalam keadaan demikian seringkali bersifat reaktif dan sporadil, tanpa menyelesaikan akan permasalahan sebenarnya. Ketika pernimpin Malaysia ini minta maaf sebagaimana dituntut oleh Indonesia atas beberapa masalah yang terjadi, hubungan kedua negara seperti normal kembali. Namun suatu saat beberapa masalah dengan sumber yang sama seperti penganiayaan terhadap TKI akan muncul kembali dan menimbulkan emosi dan reaksi yang berlebihan.

Para pekerja atau bahkan turis Indonesia yang diperlakukan buruk di negeri jiran ini akan segera, membuat marah masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pelanggaran perbatasan oleh Malaysia misalnya akan menimbulkan reaksi yang sama di berbagai kota di Indonesia. Sebagai akibat peristiwa ini, Indonesia akan meminta pemerintah Malaysia meminta maaf. Penjelasan demikian tentu saja panting namun tetap menyisakan masalah mendasar yang menjadi akar perbedaan dalam hubungan bilateral kedua negara. Keadaan demikian memerlukan suatu pemahaman lebih baik daripada sekedar melihat persoalan dari hubungan sebab akibat yang terjadi di permukaan.

Kedua negara dipahami dalam tataran perbedaan pemahaman tentang identitas satu dengan yang lain yang menjadi sumber bagi naik turunnya hubungan kedua negara. Lebih konkritnya kedua negara telah mengalami konstruksi identitas yang berbeda satu dengan yang lainnya yang berlangsung terus menerus hingga sekarang. Pemahaman tentang shared atau collective Identity antara, kedua negara sudah semakin senjang bersamaan dengan berjalannya waktu, dan dalam hal ini pemahaman Malaysia berbeda dengan periode sebelum ini, dimana konsep serumpun misalnya dipahami sebagai salah salah satu bagian ‘collective identity’ kedua negara.[[2]](#footnote-2)

Ada empat variable ‘ideational’ penting yang berkaitan dengan sumber identitas kolektif ini, yakni interdependence, common fate, homogeneity, dan self-restraint,Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri dalam membentuk identitas, melainkan secara bersama-sama. Kekuatan dari identitas kolektif demikian bergantung para intensitas dari gabungan faktor-faktor ini. Berkaitan dengan identitas kolektif ini, perlu dibicarakan juga pengetahuan bersama (common knowledge) dan pengetahuan kolektif yang ini sumber inspirasi bagi identitas Malaysia. Salah satu common knowledge yang berkembang adalah cita-cita tentang ‘Malaysia Boleh’, ‘New Asia’ dan konsep-konsep lain yang menjadi wacanan untuk mendorang kesiapan Malaysia untuk bersaing di dunia global. Malaysia seperti banyak negara lain di era globalisasi tidak bisa terlepas dari struktur peranan untuk mempersiapkan diri bersaing sebagai agen globalisasi. Pemahaman tentang aspek identitas terakhir ini yang perlu dikaji untuk melihat bagaimana Malaysia meletakkan hubungannya dengan Indonesia dari aspek kebudayaan.

1. **Joint Statement,Annual Consultation, dan Joint Commission for bilateral cooperation**

Pemerintah Indonesia dan  Malaysia sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan saling menghormati. Kesepakatan itu dicapai usai pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation OCBC) RI-Malaysia yang berlangsung di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September 2010.[[3]](#footnote-3)

Hubungan bilateral kedua negara secara umum sebenarnya telah berlangsung dengan cukup baik dan erat. Selain terdapat kedekatan pribadi antar pemimpin kedua negara, terdapat pula berbagai mekanisme konsultasi pada tingkat Presiden RI-PM Malaysia (Annual Consultations), Wakil Presiden RI-Deputi PM Malaysia, Menteri Luar Negeri kedua negara, Menteri-menteri lainnya maupun mekanisme-mekanisme teknis/sektoral. Annual Consultations ke-7 antara Presiden RI dan PM Malaysia diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia, 18 Mei 2010, dan menghasilkan Joint Statementyangmenyepakati beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti kedua negara, antara lain adalah :[[4]](#footnote-4)

1. Isu batas maritime

belum disepakatinya batas laut teritorial dan ZEE kedua negara di Selat Malaka; batas laut teritorial di Selat Singapura; batas ZEE di Laut China Selatan; batas laut teritorial, ZEE dan batas landas kontinen di Laut Sulawesi (masalah Blok Ambalat)). Dalam kaitan ini, “incursions” kapal-kapal patroli Malaysia di sekitar Blok Ambalat berpotensi untuk menimbulkan “konflik bersenjata yang tak disengaja” (inadvertent armed conflicts) dengan kapal-kapal TNI AL jika tidak dikelola dengan cermat;

1. Isu TKI di Malaysia

persepsi luas di Indonesia bahwa TKI sering diperlakukan sewenang-wenang/tidak adil di Malaysia; hukuman cambuk; hukuman mati; belum disepakatinya Mandatory Consular Notification (MCN) dan deportasi terhadap TKI yang  disertai sikap overacting RELA/aparat keamanan Malaysia jelas mengandung benih persoalan tersendiri)

1. Isu asap

Isu asap yang nyaris setiap tahun terjadi berakibat protes Malaysia

1. Isu penangkapan

Isu penangkapan (atau pun penembakan) nelayan RI di Selat Malaka oleh kapal-kapal patroli Malaysia (akibat batas ZEE kedua negara yang belum jelas) memancing protes/kemarahan Indonesia;

1. Isu pembalakan liar

Isu pembalakan liar (illegal logging) dimana ada persepsi bahwa Malaysia menarik keuntungan besar dari penjualan kayu-kayu illegal dari Indonesia

1. Isu perdagangan manusia

Isu perdagangan manusia (trafficking in persons) dimana Malaysia kerap melihat masalahnya secara simplistik yakni sekedar masalah pelanggaran imigrasi biasa dan bukan sebagai masalah kriminal yang patut diganjar hukuman berat

1. Isu media Malaysia yang sering merugikan citra Indonesia

Isu media Malaysia yang sering merugikan citra Indonesia dan TKI dengan memuat berita-berita pejorative (meremehkan), bias dan tendensius. Dalam hal ini, dapat pula disebut penggunaan kata “Indon” di berbagai media Malaysia yang jelas-jelas melecehkan Indonesia

1. Isu pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia

*Isu pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia* seperti batik, dan beberapa lagu antara lain “Rasa Sayange”.

1. **Bidang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia**

Pertemuan Konsultasi Tahunan RI – Malaysia ke-6 telah diselenggarakan di Jakarta pada 17 Maret 2009. Pada pertemuan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Ahmad Badawi membahas berbagai masalah bilateral, yaitu :

1. Sector ekonomi dan investasi

Terjadi peningkatan total volume perdagangan dari US$ 11,5 milyar pada tahun 2007 menjadi US$ 14,5 milyar dollar pada tahun 2008. Investasi Malaysia di Indonesia pun meningkat dari US$ 127 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 363 juta pada tahun 2008.

1. Sector pertanian

Perlunya peningkatan kerjasama di bidang pertanian, khususnya terkait dengan food securitydan upaya mengendalikan komoditas minyak kelapa sawit di pasar dunia.

1. Kerjasama pariwisata

Perlunya peningkatan kerjasama di bidang pariwisata, khususnya dalam hal promosi bersama.

1. **Sektor tenaga kerja**

Presiden RI menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Malaysia atas perbaikan aspek perlindungan TKI di Malaysia. Meski akan ada kebijakan Malaysia di bidang tenaga kerja asing menyusul menurunnya laju perekonomian, namun diharapkan tidak akan terjadi deportasi TKI secara besar-besaran.

1. **Batas wilayah**

Mengenai batas wilayah, kedua Kepala Pemerintahan sependapat untuk melanjutkan upaya-upaya bersama bagi penyelesaian batas maritim dan batas darat.

1. **Kerjasama dalam Kerangka General Border Committe (GBC)**

Kerjasama di bidang pertahanan dalam kerangka General Border Committee (GBC) yang mencakup latihan bersama dan pertukaran perwira, sangatlah baik dalam rangka membuat networkdi kemudian hari.

1. **Kegiatan Eminent Persons Group (EPG) Indonesia-Malaysia**

Kedua Kepala Pemerintahan menyampaikan penghargaan terhadap EPG Indonesia – Malaysia dan meyakini bahwa rekomendasi yang diajukan oleh EPG akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara

1. **Sekolah Indonesia Kota Kinabalu** **(SIKK)**

Presiden RI mengucapkan terima kasih atas fasilitasi pemerintah Malaysia dalam pendirian SIKK dan mengharapkan agar Pemerintah Malaysia dapat memfasilitasi pula rencana Pemerintah RI untuk membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

1. **MoU Visa Pelajar**

Presiden RI menyampaikan bahwa meskipun MoU Visa Pelajar belum rampung, pada prakteknya Pemri telah memberlakukan kemudahan visa untuk 2 (dua) tahun kepada para pelajar.

1. **Hubungan antar pemuda**

Kerjasama di bidang pendidikan dan pemuda akan memberikan kebaikan (investasi) bagi hubungan kedua negara di masa yang akan datang.

1. **Isu-isu regional dan global**

Perlunya pemerintah daerah untuk lebih pro-aktif dalam memajukan kerjasama di kawasan, khususnya dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam konteks internasional, kedua Kepala Pemerintahan menyampaikan penghargaan atas penyelenggaraan dan hasil-hasil yang dicapai dalam World Islamic Economic Forum (WIEF) dan Pertemuan G-20.

1. **Masalah Klaim (sengketa) kebudayaan Indonesia oleh Malaysia**.

Pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia seperti batik, Reog Ponorogo, angklung, lagu ”Rasa Sayange”, dan terakhir kasus ”Tari Pendet”.

Khusus di bidang sosial budaya, kedekatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Kedua negara memiliki kemiripan nilai budaya tradisional yang diwarisi secara turun temurun (reog, wayang kulit, batik dan sebagainya) yang jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut menyebabkan kedua negara memiliki potensi ketegangan yang apabila tidak dikelola dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan saling pengertian, akan mempengaruhi hubungan baik kedua negara.  Peningkatan people to people contact menjadi opsi penting untuk mengelola hubungan tersebut.[[5]](#footnote-5)

Upaya promosi Indonesia juga gencar dilakukan untuk meningkatkan citra positif Indonesia. Pada 30 April 2008, KBRI bekerjasama dengan importir film Malaysia melakukan launching pemutaran film “Ayat-Ayat Cinta”. Film yang mengetengahkan kisah cinta dalam kerangka universalitas Islam tersebut mendapatkan sambutan cukup luas dari kalangan publik Malaysia.[[6]](#footnote-6)

KBRI juga berperan aktif dalam menggerakkan diplomasi kebudayaan bekerjasama dengan institusi Pemerintahan dan swasta, seperti penyelenggaraan promosi seni kuliner Indonesia bekerjasama dengan hotel-hotel terkemuka di Malaysia, dengan menampilkan suguhan seni budaya tradisional dan dekorasi khas Indonesia.

RI-Malaysia telah menandatangani Memorandum Kesepakatan Bersama dalam Bidang Penerangan dan Komunikasi di Kuala Lumpur pada tanggal 13 Juli 1984. Sebagai upaya menindaklanjuti kerjasama dalam MoU tahun 1984 yang belum terealisasi, pada 2 Agustus 2007 telah ditandatangani Agreed Minutes of the 8th Joint Committee Meeting of Information oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Mohammad Nuh dan Menteri Penerangan Malaysia, Datuk Seri Zainuddin Maidin di Kuala Lumpur.[[7]](#footnote-7)

Salah satu kesepakatan adalah untuk meningkatkan pertukaran kerjasama di bidang penerangan, utamanya antar media elektronik, yaitu radio dan televisi serta peningkatan pertukaran pegawai penerangan antara kedua negara.Pada 11-12 Juni 2008, JCIM ke-9 telah diselenggarakan di Jakarta dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dan juga menginisiasi beberapa kerjasama baru seperti pembentukan Regional TV News Channel, joint photo exhibitions dan mendorong exchange visit serta pertukaran wartawan kedua negara.[[8]](#footnote-8)

Realisasi dari kesepakatan dimaksud adalah disiarkannya joint news bulletin Warta Serumpun yang diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2008 dalam kerangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-63. Tayangan secara live di Indonesia dan Malaysia melalui RTM dan TVRI tersebut menghadirkan berita-berita terkini dari kedua negara. Disamping itu, pada 29 Agustus 2008 telah diselenggarakan Pameran Foto Bersama RI-Malaysia yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Malaysia, Dato’ Ahmad Shabery Cheek di Pusat Pelancongan Malaysia.[[9]](#footnote-9)

Sebagaimana kesepakatan Pemimpin kedua negara, maka pertemuan pertama anggota Eminent Persons Group telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta. Pertemuan difokuskan pada aspek kesejarahan yang meliputi dialog pakar sejarah dan budaya, kepemudaa, media massa dan sektor swasta. Pertemuan kedua direncanakan akan dilaksanakan pada 8-9 Oktober 2008 di Kuala Lumpur.

Sebenarnya, pada tanggal 11 November 2009, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kunjungan resmi ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI telah mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Dato’ Najib Tun Razak serta kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Yang di-Pertuan Agong Mizan Zainal Abidin.[[10]](#footnote-10)

Dalam pertemuan bilateral, Presiden RI dan PM Malaysia sepakat untuk senantiasa memperkuat hubungan kedua negara, termasuk untuk meningkatkan pemahaman yang baik diantara masyarakat kedua negara. Presiden RI juga menekankan perlunya agar isu-isu yang sensitif, seperti perbatasan (Laut Sulawesi) dan***isu-isu budaya***dikelola secara arif. Selanjutnya, Presiden RI menyampaikan penghargaan atas perhatian pemerintah Malaysia dalam upaya penegakan hukum  terkait kasus-kasus TKI. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan kepentingan kelompok yang lebih besar, agar tidak dikorbankan oleh kepentingan sekelompok orang. Kedua Kepala Pemerintahan juga membicarakan isu-isu energy security, food security dan kelapa sawit serta peningkatan kerja sama investasi antara kedua negara.

1. **Asal mula terjadinya Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Malaysia**

Tidak semua persoalan antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan jalan militer untuk mencapai suatu penyelesaian. Kebanyakan untuk menyelesaikan permasalahan, Indonesia dengan Malaysia melakukan hubungan diplomasi untuk membicarakan dan melakukan lobi-lobi menyangkut permasalahan yang dihadapi kedua negara. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam proses perkembangannya tampak adanya dinamika perkembangan masyarakat yang dicirikan pula oleh adanya ketegangan dan konflik yang muncul selain kerjasama di antara mereka.[[11]](#footnote-11)

Sejak 1995, lingkup wilayah kerjasama Sosial Ekonomi Kaltim, dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Malaysia-Indonesia, hanyalah Negara Bagian Sabah. Kawasan perbatasan yang aktif berpartisipasi dalam kerjasama ini adalah sebagian kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan, sedangkan lainnya seperti Kabupaten Malinau dan Kubar, kecamatan-kecamatan perbatasannya belum termasuk. Namun sejak melalui beberapa kali pengusulan, dan pembahasan di beberapa pertemuan antara JKK/KK Sosek Malindo Pusat, Indonesia-Malaysia akhirnya kecamatan-kecamatan tersebut untuk sementara dapat pula dimasukkan, yang bukan hanya antara Provinsi dengan Negara Bagian Sabah, tetapi juga dengan Negara Bagian Serawak.

Adapun Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Sosek Tingkat Daerah/Negeri:

1. menentukan proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan dan keselamatan/keamanan di wilayah perbatasan bersama; 2. menentukan proyek-proyek di Provinsi daerah/ negeri yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah dan boleh dipergunakan secara bersama;

 3. menentukan proyek-proyek bersama;

4. merencanakan cara-cara pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi daerah perbatasan provinsi daerah tingkat/negeri msing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok kerja ditingkat pusat;

 5. melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosio ekonomi di daerah perbatasan bersama;

6. menyampaikan KK dan laporan kepada Kelompok Kerja Bersama tingkat Pusat mengenai pelaksanaan Pembangunan Sosio Ekonomi Perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebanyak tujuh kertas kerja dibahas dalam Rapat Teknis ke-18 Kelompok Kerja/Jawatan Kusa Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi (KK/JKK Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur/Peringkat Sabah, yaitu:[[12]](#footnote-12) pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL), Pembangunan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Pencegahan/ Penanggulanagan Penyelundupan, Kerjasama

Hubungan Indonesia-Malaysia sering dipahami dan dilihat secara emosional. Beberapa peristiwa seperti perlakuan terhadap para pekerja Indonesia di Malaysia, kemudian klaim Malaysia terhadap produk budaya dan karya Indonesia, selalu menimbulkan protes di Indonesia dan mengarah pada ketegangan hubungan di kedua Negara. Lebih dari itu, berhasilnya Malaysia memenangkan kedaulatan terhadap pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan klaim Malaysia terhadap wilayah laut blok Ambalat di Laut Sulawesi telah memacu protes serius di Indonesia.

Dari berbagai protes itu, kesan umum yang berkembang di Indonesia adalah bahwa Malaysia adalah negara yang semakin arogan, menginjak wibawa Indonesia dan tidak pandai balas budi. Di media bahkan disarankan bahwa untuk mendapatkan kembali respek Malaysia terhadap Indonesia, seharusnya Indonesia tidak segan-segan melakukan konfrontasi seperti zaman Sukarno ataupun meningkatkan kemampuan tempur. Tidak sedikit yang menyarankan bahwa sudah saatnya Malaysia diberi pelajaran dari kesemena-menaan kebijakan mereka.

Hubungan Indonesia-Malaysia sebenarnya semakin kompleks dan tidak dapat dipahami secara emosional. Sikap kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia lebih banyak diinformasikan dan dipengaruhi oleh pemahaman lama yang statis tentang Malaysia sebagai bagian dari negara Serumpun yang memiliki banyak persamaan nasib dan nilai-nilai dengan Indonesia. Pemahaman demikian mengabaikan perubahan identitas yang telah terjadi di Malaysia termasuk juga cara mereka memahami dan melihat Indonesia. Dijelaskan juga bahwa walaupun konsep serumpun itu sendiri masih sering digunakan oleh para elit pemerintah Malaysia, tetapi makna dan fungsinya berbeda dengan yang dipahami secara umum di Indonesia.

Sumber konflik Malaysia-Indonesia berkaitan dengan perebutan sumber-sumber ekonomi seperti di Sipadan-Ligitan, Ambalat, masalah lintas batas, perdagangan gelap,*illegal logging*,*migrant*dan*human trafficking*. Demikian juga dilaporkan sering terjadi pelanggaran perbatasan oleh Malaysia baik perbatasan udara, laut dan darat yang kemudian akan menimbulkan protes dari pihak Indonesia.

Masalah-masalah ini jelas sangat penting untuk diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Namun sejauh ini penyelesaian berbagai masalah ini sering terhambat pada soal teknis pelaksanaan yang sulit dan kurangnya kemauan politik di kedua negara untuk sungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dilakukan dalam keadaan demikian seringkali bersifat reaktif dan sporadik tanpa menyelesaikan akar permasalahan sebenarnya. Ketika pemimpin Malaysia misalnya minta maaf sebagaimana dituntut oleh Indonesia atas beberapa masalah yang terjadi, hubungan kedua negara seperti normal kembali. Namun suatu saat beberapa masalah dengan sumber yang sama seperti penganiayaan terhadap TKI akan muncul kembali dan menimbulkan emosi dan reaksi yang berlebihan.

1. **MoU penempatan tenaga kerja Indonesia antara pemerintah Indonesia dan Malaysia**

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyadari bahwa masalah tenaga kerja menjadi prioritas dalam kebijakan masing-masing negara. Kondisi domestik Indonesia dan Malaysia menjadi stimulus bagi kedua negara dalam menjalin kerjasama guna memenuhi kepentingan nasional kedua negara terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja. Di Malaysia, kebijakan ekonomi baru *(new economic policy)* dalam penerapannya telah membawa kemajuan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi de negara ini. Namun dampak lain dari kebijakan yang berorientasi pada sektor industri ini adalah arus urbanisasi besa-besaran yang terjadi di Malaysia. Orang-orang desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota. Mereka lebih memilih tidak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, akibatnya sektor-sektor tersebut kekurangan tenaga kerja. Malaysia membutuhkan asupan tenaga kerja yang mau ditempatkan di sektor tersebut. Tenaga kerja asing merupakan alternatif yang dipilih pemerintah Malaysia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negerinya.

Sedangkan di Indonesia, tingkat pengangguran yang tinggi karena kondisi perekonomian Indonesia menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia. Pemerintah Indonesia pun memiliki kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri[[13]](#footnote-13). Pengiriman TKI merupakan salah satu prioritas kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perekonomian negara yang masih tergolong berkembang dan pertumbuhan penduduk masih tinggi menyebabkan kelebihan tenaga kerja tidak diserap oleh kegiatan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah ketenagakerjaan nasional.

Kepentingan Indonesia dan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mendorong kedua negara ini menjalin hubunga kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Di satu sisi, Indonesia, perlu mengatasi masalah pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja, di sisi lain Malaysia membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kebijakan industrialisasinya. Dalam kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan, kedua pemerintah negara ini berupaya untuk mengatur agar proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dapat berjalan baik sehingga masalah-masalah yang muncul dapat teratasi dengan baik.

Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan acuan bagi program-program pembinaan dan perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Program ini dikenal dengan program goverment to goverment (G to G) yang pada dasarnya mengatur prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kesepakatan kedua pemerintah negara ini dituangkan dalam beberapa nota kesepahaman atau nota diplomatik (MoU).

### Persetujuan Jakarta 1993

Pada tanggal 17 juli 1993 di Malaysia, presiden Soeharto, perdana menteri Mahatir Mohammad sepakat untuk membentuk komite bersama sebagai upaya memperlancar dan memperbaiki prosedur pengiriman TKI. Persetujuan ini merupakan langkah-langkah lanjut dari pertemuan segitiga antara menteri-menteri (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) di Langkawi, Malaysia. Para wakil-wakil dari masing-masing negara berniat untuk meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan dalam penyediaan tenaga kerja.

Persetujuan Jakarta berisi ketentuan mengenai perlindungan dan pembinaan tenaga kerja yang diberikan oleh pejabat-pejabat diplomatik masing-masing negara dimana para TKI tersebut bekerja. Persetujuan ini ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman RI-Malaysia pada tanggal 15 oktober 1995 dan 30 januari 1996 di kualalumpur.[[14]](#footnote-14)

### Nota Kesepahaman 15 oktober 1995

Nota kesepahaman ini berisi prosedur pengambilan pekerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia pada sektor formal. Dalam nota ini ditetapkan bahwa pengiriman TKI dilakukan melalui “satu pintu”. Pemerintah Malaysia membentuk pasukan petugas pekerja asing (PPPA) yang terdiri dari beberapa instansi dan menjadi badan resmi Malaysia untuk memproses rekrut dan penyaluran TKI ke Malaysia.[[15]](#footnote-15)

Nota kesepahaman kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1998 dengan nota kesepahaman 1 agustus 1998. Hal ini dikarenakan kesepakan yang sudah disepakati tidak dapat berjalan dengan baik. PPPA yang dibentuk pemerintah Malaysia dibubarkan pada bulan februari 1997 dan fungsinya diambil alih oleh imigrasen Malaysia . PT bijak yang ditunjuk Indonesia gagal menjalankan fungsinya sebagai agen tunggal penyalur TKI.

### Nota Kesepahaman 30 Januari 1996

Nota kesepahaman ini berisi tentang garis panduan pengkajian terhadap TKI yang bekerja di sektor informal khsusnya pembantu rumah tangga. Nota ini disebut sebagai nota kesepahaman mengenai “garis panduan pengkajian pembantu rumah tangga Indonesia antara Malaysia dan Indonesia”. Secara garis besar, garis panduan dalam nota ini mengatur besarnya tarif bayaran yand dinekanakan oleh agensi Malaysia kepada majikan dan memastikan agar TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia tidak dieksploitasi.

Adapun kesepakatan yang disetujui dalam nota ini adalah pertama, besarnya tarif bayaran yang dikenakan oleh agensi Malaysia kepada majikan Malaysia ada sebesar RM 1870, pembiayaan ini meliputi biaya pengankutan TKI ke Malaysia, asuransi, jasa agensi, dan lain-lain. Sedangkan pembebanan biaya di Indonesia sebesar RM 1083 meliputi jasa penempatan, dokumen paspor, akomodasi dan pembiayaan lain-lain. Kedua, mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh majikan Malaysia jika memperkerjakan TKI sebagai pembantu rumah tangga. Persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. Kontrak kerja harus ditandatangani oleh majikan dan pembantu rumah tangga sebelum penempatan
2. Kontrak tersebut harus berisi besarnya gaji yang ditentukan oleh pihak berkuasa di Indonesia dan disetujui oleh majikan di Malaysia.
3. Bidang tugas pembantu rumah tangga meliputi tugas-tugas urusan rumah tangga dan majikan tidak dibenarkan memperkerjakan untuk tujuan-tujuan lain.

Disamping itu penempatan pembantu rumah tangga juga mempertimbangkan prinsip, norma, agama, dan budaya setempat.

Nota kesepahaman ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi TKI. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus disempurnakan terutama hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penempatan TKI ke Malaysia. Penyempurnaan mekanisme penempatan TKI ini dimaksudkan agar pemerintah masing-masing negara dapat memantau agen Malaysia, majikan di Malaysia, dan PJTKI dalam menjalankan kewajiban mereka masing-masing.

### Nota Kesepahaman 1 Agustus 1998

Nota ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman 1995 yang mengatur prosedur penempatan TKI sektor formal ke Malaysia. Nota kesepahaman 1 agustus 1998 merupakan nota yang mengatur prosedur pengambilan pekerja dari Indonesia untuk bekerja di Malaysia pada sektor formal. Hal-hal yang diatur dalam nota ini adalah pertama, mengenai prosedur pengambilan TKI, majikan dari Malaysia dapat mengambil pekerja Indonesia dengan cara mendatangi langsung PJTKI atau melalui bantuan depnaker RI. Kedua, majikan Malaysia tidak dibenarkan menggunakan jasa agensi Malaysia. Penggunaan jasa agensi Malaysia. Penggunaan jasa agensi Malaysia hanya dibenarkan untuk memproses penempatan pembantu rumah tangga saja. Ketiga, majikan Malaysia tidak dikenakan biaya apapun tetapi tetap membayar harga tiket pengangkutan TKI dari daerah asalnya di Indonesia sampai ke Malaysia. Keempat, majikan wajib membayarkan terlebih dahulu levy (sejenis pajak pekerja asing) untuk satu tahun pertama. Biaya ini dikembalikan dengan potongan upah TKI selama satu tahun pertama. Kelima, persyaratan teknis seperti perumahan, kematian, kesehatan, kartu imigrasi pengganti paspor selama TKI berada di Malaysia, larangan untuk menikah dengan sesama pekerja asing atau penduduk setempat, dan batasan umur untuk menjadi TKI adalah 18 sampai 40 tahun.[[16]](#footnote-16)

Nota kesepahaman 1 agustus 1998 dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Namun tetap memerlukan penyempurnaan dari kedua negara. Hal ini dikarenakan masih ditemukan masalah-masalah teknis yang menghambat pelaksanaan nota ini. Nota kesepahaman ini masih perlu disempurnakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia agar kerjasama kedua negara dapat berjalan dengan baik.

1. MoU Pengertian Mengenai penempatan Tenaga kerja 10 mei 2004

MoU ini diadakan di kuala lumpur pada tanggal 18 – 20 februari 2002 mengenai perlunya pihak berwenang kedua Negara secara bersama meninjau kembali “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan dimalaysia. MoU pengertian mengenai penempatan kerja ini merupakan pengganti “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia selain dari penatalaksana rumah tangga yang di tandatangani pada tanggal 1 agustus 1998”.

Pengaturan tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia selain dari penatalaksana rumah tangga yang ditandatangani pada tanggal 1 agustus 1998” tidak terpengaruh oleh perpanjangan kontrak kerja berikutnya tenaga kerja yang bersangkutan harus tunduk pada ketentuan – ketentuan dalam memorandum saling pengertian ini.

1. Dikti. Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional. 1997 [online] dalam http://ebookbrowsee.net/perkembangan-hubungan-perdagangan-bilateral-pdf-d77789509. diakses pada 29 April 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Diakses dalam   <http://fokus.vivanews.com/news/read/174887-ri-pilih-hadapi-malaysia-dengan-diplomasi> pada 18 mei 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Indonesia Malaysia sepakat selesai kan masalah lewat jalur diplomasi. <http://bataviase.co.id/node/375142.diakses> pada 18 mei 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, <http://bataviase.co.id/node/375142> [↑](#footnote-ref-4)
5. Upaya diplomasi Indonesia dan Malaysia dalam bidang kebudayaan.<http://lawan.us/link/upaya-diplomasi-indonesia-dan-malaysia-bidang-budaya/>.diakses pada 18 mei 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://lawan.us/link/upaya-diplomasi-indonesia-dan-malaysia-bidang-budaya/.diakses> pada 18 mei 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tantangan diplomasi Indonesia dan Malaysia. <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/tantangan-diplomasi-indonesia-malaysia/.diakses> tanggal 18 mei 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. I Ketut ardhana, Studi Perbatasan Antara Indonesia dan Malaysia: Globalisme dan Lokalisme, Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX dan Kongres MSI yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 5-8 Juli 2011, hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.kaltimprov.go.id/berita-kkjkk-sosek-malindo-bahas-7-kertas-kerja.html, diakses pada 12 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional yang dilandasi oleh komitmen nasional sejalan dengan amanat GBHN 1993 (TAP MPR No11/PR/1993). [↑](#footnote-ref-13)
14. Masri Hayat, SH, Bimbingan Teknis Penempatan TKI ke Malaysia:Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia Tentang Penempatan TKI Sektor Formal dan Informal ke Malaysia, APJATI, DEPNAKER RI, dan KBRI [↑](#footnote-ref-14)
15. Laporan tahunan KBRI kualalumpur 1997-1998, hal 332. [↑](#footnote-ref-15)
16. Laporan Tahunan KBRI Kualalumpur 1999-2000, Hal 103. [↑](#footnote-ref-16)